

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliasari, V., & Rahmawati, E. (2020). *Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81–97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1273>.
- Badan Pusat Statistika Kota Metro. (2020). *Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020 - 2021*. <https://metrokota.bps.go.id/indicator/52/40/1/laju-pertumbuhan-menurut-lapangan-usaha.html>
- Dewi, I. A. (2019). *Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5da003d5b01c4b456747b71a/Pengaruh-Insentif-Pajak-PPh-Badan-terhadap-Kenaikan-Dunia-Usaha-dan-Investasi>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Surat Edaran Nomor SE-47/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan N.*
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. PT Niaga Swadaya.
- Hasibuan, B. M. (2016). *Sekilas tentang Insentif Pajak*. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu - Isu Kontemporer*. In *Jurnal Unikom* (Issue Perpajakan). Graha Ilmu.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro. (2020). *Buku Profil KPP Pratama Metro 2020*.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro. (2021). *Buku Profil KPP Pratama Metro 2021*.
- Kartiko, D. N. (2020). *Insentif Pajak dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-322/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Realisasi Anggaran*, 1–2.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). APBN KiTa : Kinerja dan Fakta. *APBN KiTa, Desember 2*, 47.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). APBN KiTa : Kinerja dan Fakta Kaleidoskop 2020. *APBN KiTa, Januari 20*, 65.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Realisasi Anggaran*, 1–2.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keli).

- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Masitoh, S. (2021). *Hingga Pertengahan Agustus 2021 Realisasi Insentif Pajak Mencapai Rp 51,97 Triliun*. Konstan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-pertengahan-agustus-2021-realisasi-insentif-pajak-mencapai-rp-5197-triliun>
- Metrotvnews. (2020). *Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid - 19*. YouTube : Metrotvnews. <https://www.youtube.com/watch?v=uawbvRnS-0Y&t=75s>
- Pahlevi, M. R. R. (2021). Analisis Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Insentif Angsuran PPh Pasal 25 Sesuai PMK Nomor 110/PMK.03/2020 di KPP Pratama Tulungagung. *KTTA PKN STAN*, 49–50.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Konsep Hukum Pajak (Edisi 2)*. Mitra Wacana Media.
- Primandita, F., & Indahsari, D. N. (2020). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>.
- Rahayu, P. (2016). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (e-filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)*. 1–9. <https://doi.org/10.31227/osf.io/s45k3>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang - Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala*. Vol 35 No. 2,

Volume 35, 2. http://repository.widyamandala.ac.id/491/1/4.Naning_44-54.pdf

- Sandra. (2021). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia>
- Santoso, D. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Blitar. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara*.
- Selvi, & Ramadhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Sodikin. (2014). *Akuntansi Pengantar I*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Soemitro, R. (2004). *Aspek dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. PT Refika Aditama.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2000). Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey. In *United Nations*. United Nations.
- Varello, M. A. (2021). Tinjauan Pengaruh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 Terhadap Penerimaan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *KTTA PKN STAN*, 54–55.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*.